



PERSEPSI SISWA TERHADAP KONSEP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Arifin

STKIP Sebelas April Sumedang, Indonesia
arifin6369@gmail.com

Abstract

Received: 10 November 2020
Revised: 23 Maret 2021
Accepted: 23 Maret 2021

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, proses tersebut di mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi manusia, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang, secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, bertanggung jawab dan bersosialisasi. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraannya merupakan salah satu pelajaran penting yang harus di terapkan sejak dini terhadap semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, selain itu pendidikan kewarganegaraan juga sering di pandang sebagai mata pelajaran pendidikan moral, karena berupaya untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian para peserta didik untuk lebih menghargai nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Penelitian ini berusaha untuk menggali persepsi siswa terhadap konsep demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan, adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, implementasi nilai-nilai demokrasi yang di jalankan di lingkungan sekolah SMA Kabupaten Sumedang sejatinya telah dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama antara siswa dan para guru, proses tersebut di wujudkan dalam beberapa tindakan seperti saling toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, dan menghargai perbedaan. Kemudian pihak sekolah juga berupaya untuk mengarahkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai demokrasi di kalangan para siswa, metode pembelajaran tersebut rupanya dinilai sangat cocok untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeluarkan ide, gagasan, atau pendapat mereka dengan penuh rasa tanggungjawab.

Keywords: Persepsi; Konsep Demokrasi; Pendidikan Kewarganegaraan

(*) Corresponding Author: Arifin, arifin6369@gmail.com

How to Cite: Arifin. (2021). Persepsi Siswa Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Research and Development Journal of Education*, 7 (1), 544-552.

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia yang mencakup sikap, pengetahuannya, dan keterampilannya. Hal ini sesuai Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di perlukan sebuah strategi, skenario dan inovasi dalam

teknik pembelajaran yang akan di terapkan di lingkungan sekolah. Selain itu pendidikan juga di harapkan dapat mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih demokratis melalui berbagai bidang kompetensi yang dimilikinya (Aulawi & Srinawati, 2019).

Pendidikan pada hakekatnya merupakan pengembangan yang di tekankan pada peserta didik terhadap pengetahuan, kecerdasan, nilai, pola tingkah laku, dalam upaya nya meningkatkan kemampuan dan membentuk watak suatu bangsa yang bermartabat serta membentuk masyarakat yang demokratis. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi hendaknya dapat diaktualisasi dalam kehidupan nyata melalui suatu transformasi pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Pola pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memang menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pada siswa, selain itu metode pendidikan kewarganegaraan bukan sebatas pada upaya konsep yang bersifat hafalan teori belaka, melainkan mengharuskan setiap siswa agar mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari baik ketika berada di dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan sosial (Avianto, 2013).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran di sekolah saat ini harus lebih menekankan kepada pembentukan karakter, dimana substansi pembelajarannya mulai mengarah pada bagaimana menjadikan warga negaranya mampu berpartisipasi secara efektif, cerdas, demokratis dan bertanggung jawab, selain itu pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk mencapai dua sasaran pokok yang seimbang. Pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang kedua membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kedua sasaran ini hendaknya dapat dicapai secara serentak agar peserta didik tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan belaka, tetapi memiliki kemampuan dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasainya. Pendidikan Kewarganegaraan selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga dapat membentuk sikap demokratis.

Sikap demokrasi dapat terwujud apabila pelaksanaan demokrasi tersebut memberikan hak-hak dasar manusia, begitupun ketika kosep demokrasi tersebut di terapkan di lingkungan sekolah, khususnya pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pembentukan sikap demokrasi dapat diterapkan melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam melaksanakan pembelajarannya, seorang guru tentunya perlu mengembangkan strategi/ taktik yang tepat, melalui pendekatan dan model belajar yang akan diterapkan serta didukung oleh beragam media yang interaktif, beberapa kemampuan yang harus dikuasai antara lain, menguasai materi ajar , merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik serta mampu mengembangkan instrumen penilaian evaluasi dalam proses dan hasil belajar yang bukan hanya mencakup aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor sehingga dapat membentuk karakter peserta didik secara tepat (Djaafar et al.,2021).

Masyarakat demokratis adalah cerimanan masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun pendapatnya secara berdaulat. Salah satu proses pembentukan sikap demokrasi yang selama ini di lakukan oleh pemerintah yaitu melalui pendidikan di lingkungan sekolah dimana unsur terpenting didalamnya mencakup guru, siswa dan mata pelajaran yang di peroleh oleh siswa. Oleh sebab itu, melalui proses pendidikan kewarganegaraan disetiap lembaga pendidikan harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Dalam kehidupan dunia pendidikan seperti sekarang ini yang disertai dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks menuntut guru untuk

dapat mengarahkan dan memotivasi siswa dalam kegiatan yang melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratis dengan menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan inovatif, misalnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat. Dengan demikian siswa dapat termotivasi untuk merealisasikan kehidupan yang demokratis di lingkungan sekolah dan siswa mampu menerapkannya baik di sekolah, keluarga maupun di masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara. Adapun tiga komponen penting yang harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan meliputi, pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan watak-watak kewarganegaraan. Aspek-aspek tersebut menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral, dengan demikian, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner yang harus di kuasai oleh para siswa (Juliardi, 2015).

Implementasi budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah sangat penting untuk diwujudkan di era milenial ini, selain untuk meningkatkan peluang dalam berbagai kemajuan terhadap para siswa, proses tersebut juga di sinyalir untuk menghadapi beragam ancaman dan tantangan terhadap identitas suatu bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi mata pelajaran yang berfungsi menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar semangat kebangsaan, mempersiapkan proses alih generasi secara bertanggung jawab, dan memberdayakan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang sarat dengan tantangan dan ketidakpastian. Atas dasar itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengakomodasi berbagai isu aktual yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Maftuh, 2008).

Di sisi lain mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, berkarakter, dan berintegritas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk memfokuskan inti permasalahan pada bagaimana persepsi siswa terhadap konsep demokrasi melalui penyampaian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di lingkungan sekolah menengah atas Kabupaten Sumedang.

METHODS

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri adalah suatu bentuk penilaian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi pada kondisi objek ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer atau subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah SMA Kabupaten Sumedang. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui pengamatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data pada penelitian ini di lakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Strauss & Corbin, 2003)

RESULTS & DISCUSSION

Konsep Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa dalam setiap proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, guru sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan atau isu kewarganegaraan. Isu-isu kewarganegaraan yang dimaksud dapat berasal dari lingkungan sekitar siswa, maupun lingkungan secara luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan suasana yang demokratis kepada siswa, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui beragam aktivitasnya. Adapun penjelasan mengenai pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter sebagaimana telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang 1945 (Purwaningsih, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negaranya, sementara itu, dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah SMA Kabupaten Sumedang guru selalu memulainya dengan penyampaian berbagai cerita, gambar kliping, artikel, ataupun berita-berita aktual yang berhubungan dengan materi ajar yang sedang di sampaikan. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pembelajaran konsep demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat tergambar pada materi pokok prinsip-prinsip demokrasi, dimana sebagian besar siswa telah memahaminya dan di tuntut untuk dapat menerapkannya dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Pada dasarnya pendidikan diharapkan dapat membangun dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu pendidikan harus mengarah pada pandangan dan praktek yang membangun ruang pembelajaran dan dapat memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keberadaban. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi yang dapat di implementasikan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Kabupaten Sumedang di landaskan pada nilai toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati oranglain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan (Rini, 2017).

Selama proses pembelajaran, guru berusaha menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang biasa tetapi perbedaan pendapat itu harus diutarakan dengan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Aspek lain yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah kerjasama, kebebasan berkelompok dan kepercayaan diri. Metode pembelajaran yang dipilih guru di upayakan agar siswa mampu bekerjasama secara baik dengan teman-temannya secara berkelompok. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kelompoknya, namun terkadang guru sendiri yang membagi siswa ke dalam kelompok diskusi.

Sejatinya pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah memang perlu diterapkan untuk menghadapi tantangan era globalisasi yang diyakini akan menghadirkan banyak perubahan pada berbagai aktivitas manusia tidak terkecuali pada bidang pendidikan, itu artinya, dunia pendidikan di tuntut untuk dapat mencetak sumber daya manusia yang

bermutu dan profesional khususnya dalam menyiapkan para generasi yang berwawasan tinggi serta memiliki kepribadian yang kuat di tengah-tengah konflik peradaban.

Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan para siswa yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi pancasila. Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa secara keseluruhan. Hasil dari pengamalan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan bagi para siswa di SMA Negeri Kabupaten Sumedang, menghasilkan bagaimana memberikan penjelasan mengenai pengetahuan serta pemahaman kepada siswa betapa pentingnya membangun nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran, contohnya menaati tata tertib peraturan sekolah, berani mengemukakan pendapat, bersikap menghargai perbedaan pendapat teman, sikap menghargai perbedaan status sosial, sikap menghargai perbedaan, suku dan budaya serta hak dan kewajiban yang melekat pada diri manusia (Sartika et al.,2018).

Maka berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai pengimplementasian nilai-nilai demokrasi yang terintegrasi terhadap mata pendidikan kewarganegaraan di sekolah SMA Kabupaten Sumedang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena sikap tersebut memang harus di tanamkan pada setiap siswa sehingga bisa membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki jiwa atau karakter yang baik, dan kompetensi yang efektif. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memang memiliki nilai lebih khususnya dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, hal tersebut tercapai atas kepercayaan dan kerja sama yang terjalin antara guru dan peserta didik dan seluruh warga sekolah (Taniredja & Abduh, 2016).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah yang demokratis dan manajemen kelas yang baik akan memengaruhi guru dan peserta didiknya dalam berbuat positif dalam segala hal. Sikap dan perilaku guru dalam mengelola kelas merupakan salah satu faktor yang paling penting yang dapat memengaruhi sikap demokratis seluruh peserta didik. Tindakan seperti membuat aturan dalam pengelolaan kelas, menumbuhkan ide kreatif peserta didik, dan memperlakukan semua peserta didik di dalam kelas, dapat memengaruhi sikap demokratis peserta didik, oleh karena itu seluruh warga sekolah telah menyepakati peraturan-peraturan tersebut karena hal tersebut sejatinya merupakan bagian dari kehidupan yang demokratis.

Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Dalam Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi

Sekolah merupakan tempat yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi, melalui prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, serta saling menghargai satu sama lain di harapkan dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi di kalangan para siswa. Misalnya siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan kelas, kenyamanan kelas, dan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi iklim pembelajaran di kelas bukan hanya ketika pembelajaran pendidikan kewarganegaraan saja akan tetapi pada seluruh pelajaran yang akan di sampaikan. Interaksi guru dan siswa di ibaratkan sebuah subjek dan objek yang sama-sama membangun karakter dan jati diri (Usman & Syukri, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah dapat terwujud melalui (1) Perubahan kurikulum dengan dimasukkannya pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, oleh karena itu pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus yang sudah ada (2) Guru lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien, contohnya melalui pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan oleh guru di SMA Kabupaten Sumedang dalam proses belajar mengajar para guru turut menggunakan beberapa media pendukung seperti LCD, Laptop, komputer dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran, karena guru tidak monoton dalam menyampaikan materi-materi yang telah di sampaikan (3) Budaya yang dianut oleh warga sekolah SMA Kabupaten Sumedang memang menekankan pada budaya disiplin. Kedisiplinan merupakan salah satu budaya yang harus ditaati oleh semua anggota sekolah baik itu siswa, guru maupun kepala sekolah itu sendiri. Dalam pelaksanaannya guru sebagai pendidik diwajibkan memberikan teladan dalam menegakkan disiplin di sekolah (4) Kepemimpinan kepala sekolah di SMA Kabupaten Sumedang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan sangat menyadari hal tersebut, dalam melaksanakan tugas di sekolah, kepala sekolah selalu berinteraksi dengan guru sebagai bawahannya, melaksanakan monitoring dan menilai kegiatan guru sehari-hari.

Sejatinya faktor pendukung yang paling utama dari penerapan nilai demokrasi ini adalah lingkungan sekolah, dimana proses tersebut dapat mempermudah peserta didik dan guru dalam menerapkan nilai dan sikap demokratis, sebab dengan adanya kebebasan dalam lingkungan sekolah dalam hal berpendapat akan membuat peserta didik terbiasa akan nilai-nilai demokrasi. Persamaan hak di dalam kelas juga membuat peserta didik merasa dihargai dan dihormati walaupun banyak perbedaan yang di temukan, mulai dari ras, suku, bahkan agama (Vichaully & Dewi, 2021).

Adapun beberapa faktor penghambat dalam upaya implementasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah antara lain (1) Kurangnya dukungan orang tua dalam mengawasi anak-anak nya karena terlalu sibuk bekerja dan mengabaikan prestasi belajarnya sehingga banyak di temukan kasus siswa yang mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas (2) Masyarakat menjadi salah satu wahana yang dominan bagi pembentukan sikap, perilaku dan prestasi seorang siswa, perilaku masyarakat yang cenderung negatif tentu saja sangat disayangkan, kondisi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan siswa (3) Keterbatasan biaya masih menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pembelajaran sejatinya pemerintah belum mampu menopang biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya saja dalam penyediaan media pembelajaran, dimana guru harus bersedia mengeluarkan biaya sendiri untuk menyusun media, kondisi ini terkadang masih terjadi di SMA Kabupaten Sumedang (4) Perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada siswa yang memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi, namun ada juga sebagian siswa yang memang agak lambat. Kondisi inilah yang menjadi tantangan ke depan bagaimana sekolah dapat memiliki input yang relatif lebih baik, guru hendaknya dapat menyalurkan kondisi ini dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Ngombar et al., 2019)

Menanamkan nilai-nilai demokrasi tentunya tidak hanya di lakukan ketika siswa berada di dalam lingkungan sekolah saja lebih dari itu proses tersebut harus tetap di

laksanakan ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah. Saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan kunci utama agar nilai-nilai demokrasi dapat di pelihara dengan baik, sifat saling menghormati ini sangat sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan ini juga sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Budaya menghormati ini perlu ditanamkan sejak dini khususnya di dalam lingkungan keluarga selanjutnya lingkungan sekolah dapat berperan dengan mengintegrasikannya pada berbagai mata pelajaran khususnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memang mempunyai tugas yang salah satunya adalah mewariskan budaya-budaya bangsa kepada generasi muda, seperti budaya saling menghormati antar sesama.

Untuk mendukung upaya pembinaan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka pembelajaran tersebut memenuhi beberapa unsur penting di antaranya (1) Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus didasarkan pada pendekatan ilmiah (2) Peranan pendidikan kewarganegaraan harus dapat memberdayakan rakyat dan membekali mereka dengan kemampuan dan karakteristik sebagai warganegara yang baik (3) Metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis, mengambil keputusan dan menciptakan suasana dialogis diantara siswa (4) Pendidikan kewarganegaraan harus memegang peranan penting dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis (Izma & Kesuma, 2019).

Maka berdasarkan uraian penjelasan yang telah di jelaskan di atas bahwasannya metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hendaknya bermuatan nilai-nilai yang positif, artinya proses tersebut harus bermuara pada pengembangan sikap, nilai, dan moral atau kecerdasan siswa, bukan hanya mengembangkan kemampuan dan kecerdasan intelektual saja, kemudian yang kedua pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hendaknya mengundang siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar, karena keaktifan siswa ini dapat diwujudkan melalui aktivitas membaca, bertanya, berdiskusi, mengumpulkan data, menganalisis data, menilai, memecahkan masalah, ataupun mengambil keputusan.

Dengan demikian, nilai demokrasi yang terdapat pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang di langsung di lingkungan sekolah sejatinya dapat dimaknai sebagai cerminan perilaku para siswa sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Nilai yang dikemukakan diatas sesuai dengan apa yang menjadi nilai demokrasi dan perilaku yang ditanamkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan dan mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan atau golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan memang bertujuan untuk mempersiapkan warganegaranya agar saling mendukung dan mengembangkan kehidupan secara terbuka serta dapat di pertanggungjawabkan secara moral kepada manusia dan Tuhan Yang Maha Esa (Angraini, 2017).

Pada dasarnya pendidikan harus mampu melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, serta memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan dengan penuh tanggung jawab, karena keutuhan demokrasi dalam suatu negara akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negaranya yang memiliki kultur dan budaya demokratis pula. Oleh karena itu, melalui peran sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang di tunjuk langsung oleh pemerintah di pandang sebagai salah satu wadah yang paling tepat untuk menanamkan atau membentuk masyarakat yang demokratis sejak dini, karena pada proses tersebut, peserta didik sebagai warga negara akan di bina dan

diberi pengarahan secara langsung, dalam upaya nya menanamkan nilai-nilai demokrasi yang di intergrasikan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya banyak sekali nilai-nilai positif yang dapat di ambil oleh peserta didik ketika mempelajari pendidikan kewarganegaraan tersebut seperti (1) memiliki pengetahuan tentang sistem politik ekonomi, (2) memahami dan menyadari nilai-nilai masyarakat demokrasi, (3) mampu mendiskusikan isu-isu kontroversial dan yang terakhir (4) mampu menemukan secara personal model-model yang dapat dijadikan teladani dalam kehidupan sehari-hari.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah di sampaikan di atas maka peneliti telah menemukan beberapa poin penting mengenai persepsi siswa terhadap konsep demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan, di antaranya, pendidikan kewarganegaraan menempati tempat yang strategis untuk mempersiapkan para generasi muda menjadi warganegara yang demokratis. Proses demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini memang perlu disikapi dengan sungguh-sungguh melalui konsep dan pelaksanaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang fungsional di harapkan dapat menyiapkan warga negara yang ideal untuk mendukung dan mengamankan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Pada tahap implementasi guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk selalu tanggap terhadap berbagai perubahan dan pembaharuan kurikulum sehingga dapat membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Bentuk nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lingkungan sekolah SMA Kabupaten Sumedang di laksanakan dengan membangun dan menanamkan jiwa nasionalisme sejak dini, dalam hal tersebut para siswa di tuntut untuk dapat merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi secara mandiri dan penuh dengan rasa tanggungjawab, selain itu para guru dan murid beserta kepala sekolah saling bekerja sama, untuk dapat membangun dan berkontribusi secara penuh dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi tersebut di lingkungan sekolah.

REFERENCES

- Angraini, R. (2017). Karakteristik media yang tepat dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai. *Journal of Moral and Civic education, 1(1)*, 14-24.
- Aulawi, A., & Srinawati, S. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan Organisasi Untuk Meningkatkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Di SMK Darus Syifa Kota Cilegon. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 2(1)*, 38-50.
- Avianto, S. (2013). Penanaman Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Skripsi S, 1*.
- Djaafar, L., Lukum, R., Adjie, Z., Damopolii, R., Wantu, S., & Alim, S. R. (2021). Membangun Nilai-nilai Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdidas, 2(6)*, 1311-1315.
- Izma, T., & Kesuma, V. Y. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, 17(1)*, 84-92.

- Juliardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 3.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134-144.
- Ngombar, L., Wadu, L. B., & Ladamay, I. (2019, December). Partisipasi Warga Negara Dalam Nilai Demokrasi Untuk Meningkatkan Ketrampilan Warga Negara Melalui Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Pertama. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 197-204).
- Purwaningsih, P. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Di SMP Islam Nurul Hidayah Reni Jaya–Depok). *Proceedings universitas pamulang*, 1(1).
- Rini, N. D. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 3(3).
- Sartika, M., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2018). Peranan Pembelajaran PPKn dalam Menginternalisasi Nilai-nilai Demokrasi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(10).
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Taniredja, T., & Abduh, M. (2016). Pengembangan Nilai-Nilai Demokratis Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *PKn Progresif*, 11(2), 159-163.
- Usman, A., & Syukri, M. (2020). Pemanfaatan Media Software Interaktif untuk Penguasaan Konsep Nilai-Nilai Demokrasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(11).
- Vichaully, Y., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Demokrasi di Kelas Sekolah Dasar Sebagai Bentuk Bagian Dari Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(11).